



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2020



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA ,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan perkenan Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020 telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan kinerja SKPD yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemudian disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai agenda tahunan PD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020 adalah instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terpadu, dan bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan skala prioritas.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pelayanan publik bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Riau dan bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Agustus 2019
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. SYARIFUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19620504 198803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 S/D TRIWULAN II TAHUN 2019	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu– isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	55
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 2020	60
3.3. Program dan Kegiatan	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	71
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	76
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	76
5.3 Rencana Tindak Lanjut	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019.....	11
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	23
Tabel 2.3. Data Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Riau pada Tahun 2018	28
Tabel 2.4. Rincian Data Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Riau	34
Tabel 2.5. Rekap Data Klasifikasi Desa Dan Kelurahan Se Provinsi Riau.....	35
Tabel 2.6. Tabel Indeks Desa Membangun.....	35
Tabel 2.7. Data Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2018 di Provinsi Riau	38
Tabel 2.8. Data Perkembangan BUMDes Provinsi Riau	39
Tabel 2.9. Data Perkembangan Pasar Desa di Provinsi Riau.....	40
Tabel 2.10. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Riau	45
Tabel 2.11. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	54
Tabel 3.1. Roadmap Dana Desa	59
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2020	63
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.....	66
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 mengamanahkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemudian disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai agenda tahunan PD.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan

jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2020 yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun

2020. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 9) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017, Lembaran Daerah No. (12), 128 Hlm. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;
 - 10) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
 - 11) Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2019, Tentang RKPD Tahun 2020;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai Panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020.

- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2020.

Sedangkan untuk Tujuannya adalah:

- a. Menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD;
- b. Sebagai dokumen yang berisikan Program-program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengrtian ringkas tentang renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, proses penyusunan Renja PD, Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang undang, peraturan pemerintah, perraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2018 S/D TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses

tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kerja Renstra perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : Faktor- factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap bahan rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup, berupa :

- a. catatan penting yang perlu mendapat perhatian;
- b. kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 S/D TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/ kegiatan, pelaksanaan rencana program / kegiatan serta hasil rencana program/ kegiatan. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja didasarkan pada dimensi-dimensi sasaran yang terdapat pada indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya

hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja menurut Perpres No. 29 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome*. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2018 s/d triwulan II tahun 2019 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	5750	1150	1150	1150	100%	35	2335	40,61%	
01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
01.01.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	55	11	11	11	100%	11	33	60,00%	
01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015-2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
01.01.012.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minum yang di sediakan	36.054,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100%	10353	13453	37,31%	
01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	622	110	110	110	100%	100	320	51,45%	
01.01.022.	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan kehumasan	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
01.01.019	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Rentang waktu Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.02.013	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5	1	1	1	100%	1	3	60,00%	
01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	10	2	2	2	100%	2	6	60,00%	
01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	262	55	55	55	100%	55	165	62,98%	
01.02.040	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	5	1	1	1	100%	1	3	60,00%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan terhadap gedung kantor	10	2	2	2	100%	2	6	60,00%	
01.02.199	Penyediaan Sarana Kearsipan	Jumlah sarana kearsipan	55	11	11	11	100%	11	33	60,00%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.03.xxx	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	370	95	95	95	100%		190	51,35%	
01.03.xxx	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu	370	95	95	95	100%		190	51,35%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	281	45	45	45	100%	12	102	36,30%	
01.05.012	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur senam dan pengajian	485	97	97	97	100%	100	294	60,62%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.06.005	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang disusun	5	1	1	1	100%	1	3	60,00%	
01.06.025	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan Keuangan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	6	3	3	3	100%	0	6	100,00%	
01.06.030	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah Dokumen Renstra SKPD yang disusun	2	0	1	1	100%	1	2	100,00%	
01.06.016	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program/kegiatan	3	1	1	1	100%	1	3	100,00%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Tingkat Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan (dari Total Pendapatan Desa)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100,00%	
01.15.007	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi	Jumlah kab/kota yang mengikuti bulan bakti gotong royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Riau	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
01.15.037	Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM	jumlah pengurus LPM yang mengikuti peningkatan kapasitas	250	50	50	50	100%	50	150	60,00%	
01.15.014	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Jumlah pengurus yang dibina mengikuti peningkatan kapasitas	2850	570	570	570	100%	570	1710	60,00%	
01.16.009.	Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS	Jumlah Pengurus Pengelola BP SPAMS yang mengikuti penguatan kapasitas	300	60	60	60	100%	60	180	60,00%	
01.15.XX	Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se- Provinsi Riau	Jumlah Pengurus Lembaga Adat yang mengikuti Peningkatan	500	100	100	100	100%	100	300	60,00%	
01.15.XX	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota Yang mengikuti Gelar	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
01.15.032.	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Gelar TTG Tingkat Nasional	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
01.15.033.	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Jumlah kab/kota yang di bina dan mendapatkan peningkatan pelayanan unit pengaduan masyarakat (UPM)	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
01.15.033.	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan administrasi	60	12	12	12	100%	10	34	56,67%	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan Yang Berkembang (BUMDes, Pasar Desa dan POSYANTEK)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100,00%	
01.16.039.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Provinsi Riau	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mengikuti BIMTEK	100	20	20	20	100%	20	60	60,00%	
01.16.038.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes Se- Provinsi Riau	Jumlah Pengurus BUM Desa yang di Bina	250	50	50	50	100%	50	150	60,00%	
01.16.010.	Pemetaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Pemetaan Pembangunan	5	1	1	1	100%	1	3	60,00%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
01.18.044.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	250	50	50	50	100%	50	150	60,00%	
01.15.009.	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan	Jumlah desa /kel yang di fasilitasi dalam rangka penguatan Profil desa dan kelurahan	110	22	22	22	100%	22	66	60,00%	
01.18.042.	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Pengurus BPD yg mengikuti Peningkatan Kapasitas dan terpilihnya BPD Terbaik tingkat Provinsi Riau	200	40	40	40	100%	40	120	60,00%	
01.18.045.	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur Desa yang mendapatkan BIMTEK Penyusunan RPJMDes dan	250	50	50	50	100%	50	150	60,00%	
01.15.008.	Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa	jumlah kabupaten/kota yang di fasilitasi dalam rangka penataan Desa/Keluahan	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%	
01.18.043.	Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah peserta Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	780	156	156	156	100%	156	468	60,00%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
01.18.046.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek	500	100	100	100	100%	100	300	60,00%	
01.18.047.	Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek manajemen aset desa	450	90	90	90	100%	90	270	60,00%	
01.18.041.	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi perkembangannya sesuai dengan kategori penilaian	110	22	22	22	100%	22	66	60,00%	
01.15.003.	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa	Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	5	1	1	1	100%	1	3	60,00%	
01.15.001.	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau	Jumlah Pendamping Profesional Desa yang mengikuti Pelatihan	735	147	147	147	100%	147	441	60,00%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau sebelumnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan adanya transformasi dalam pembentukan organisasi perangkat daerah salah satunya pada urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Pasal 3 ayat 1 huruf d poin 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian serta 4 (empat) Bidang dengan 12 (dua belas) Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat

Terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, antara lain:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program ;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1) Seksi Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Seksi Sosial Budaya Masyarakat dan Komunitas Adat;
- 3) Seksi Keswadayaan Masyarakat.

4. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Kelurahan;
- 2) Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan;
- 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

5. Bidang Fasilitas Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

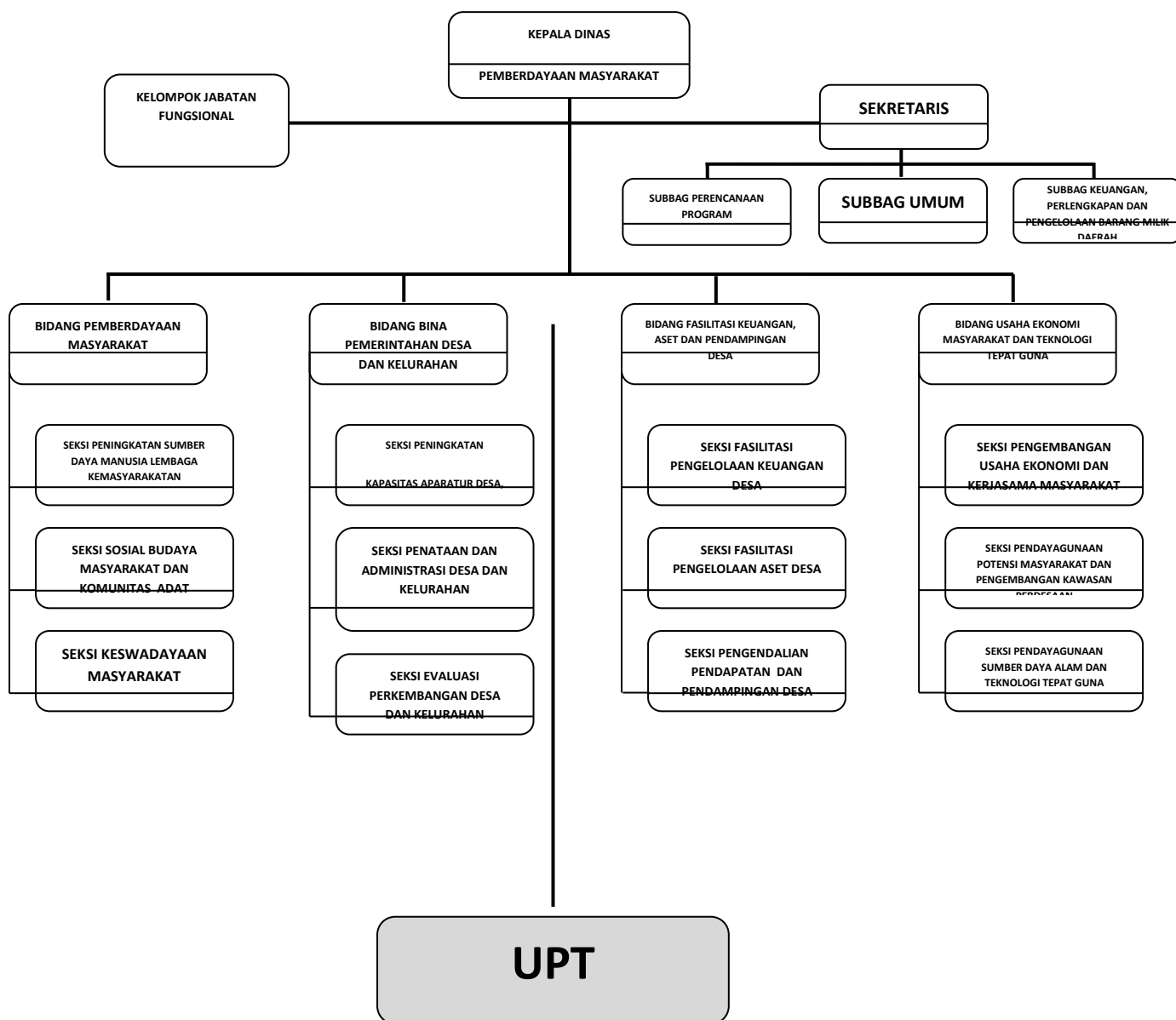
- 1) Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Seksi Fasilitas Pengelolaan Aset Desa;
- 3) Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa.

6. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat;
- 2) Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- 3) Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU



Sumber: bagian umum dan kepegawaian Dinas PMD Tahun 2019

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.

Dalam menjalankan TUPOKSI melaksanakan pelayanan publik dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan desa di Provinsi Riau diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau telah menetapkan sasaran strategi serta Indikator Kinerja Utama yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2019-2024. Untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dapt dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Provinsi Riau INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n-2)	(thn n-1)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan			6%	6%	15%	20%	5%	5,50%	12%	18%	
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa			6%	6%	15%	20%	5%	5,50%	12%	18%	
3	Meningkatnya lembaga ekonomi desa aktif			6%	6%	15%	20%	5%	5,50%	12%	18%	
4	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel			6%	6%	15%	20%	5%	5,50%	12%	18%	

Berdasarkan Tabel. 2.2 di atas berikut ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau diarahkan pada 4 (Empat) sasaran strategis untuk mencapai Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal yang maju dan dinamis dalam pembangunan masyarakat desa/kelurahan;

Kinerja sasaran ini mempunyai target berfungsinya berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada ditingkat desa, sehingga dapat tercipta kondisi sosial masyarakat yang dinamis, tumbuhnya semangat gotong royong, partisipasi sehingga tingkat keswadayaan dalam pembangunan desa semakin tahun-semakin meningkat. Hal ini tercermin dari struktur APBDes sejauh mana tingkat keswadayaan masyarakat terhadap total APBDes. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendorong sasaran ini tercapai diantaranya:

- Peningkatan kapasitas LPM se Provinsi Riau
- Peningkatan Kapasitas Pengurus LAM se Riau
- Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK se Provinsi Riau
- Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat Provinsi Riau

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan secara sinergi dengan program kabupaten/kota dengan berbagai sasaran terutama masalah lokus yang menjadi sasaran kegiatan. Sedangkan kegiatan BBGRM dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

Lembaga Kemasyarakatan

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Dibentuknya lembaga di setiap desa sebagai wujud partisipasi masyarakat desa akan mempercepat proses pembangunan desa. Hal ini dikarenakan masyarakat desa akan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka karena tumbuh dan berkembang dari masyarakat desa itu sendiri (*grassroot*). Program-program yang dicanangkan pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, kelembagaan, aspirasi

masyarakat setempat dan lain sebagainya. Dikarenakan dana anggaran pembangunan yang tersedia di tiap desa terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan serta didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut. Jika diperhatikan dengan seksama, aturan main proses penyusunan program-program pembangunan yang dilakukan selama ini sesungguhnya merupakan mekanisme ideal, artinya berniat mengakomodasikan sebesar-besarnya aspirasi masyarakat (desa). Proses penyusunan program pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari tingkat desa yaitu kegiatan musyawarah pembangunan desa, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan. Demikian seterusnya hingga disalurkan di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan lintas unit-unit kerja kabupaten/kota. Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat berbeda dengan suatu organisasi atau asosiasi. Perbedaan tersebut ada pada tujuan pengaturannya, yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya suatu tujuan maka pengaturan itu terkait dengan masalah organisasi tetapi apabila pengaturannya itu berorientasi pada suatu pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder, maka pengaturan itu berarti terkait dengan masalah kelembagaan.

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya. Bagi masyarakat desa, lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan. Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa. Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar. Perubahan dan perkembangan kelembagaan

pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa. Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan. Kondisi internal adalah semua potensi dan akses yang dimiliki desa tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum. Diferensiasi kelembagaan menjadi lebih berkembang setelah era pembangunan, dimana Pemerintah melalui berbagai departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa.

Terkait dengan penguatan terhadap desa ada tiga hal pokok yang pertama adalah memperkuat dan mendayagunakan perangkat pemerintah lokal, karena tanpa itu tidak akan bisa jalan pemerintahannya. Yang kedua adalah memperkuat lembaga kemasyarakatan, karena melalui kelembagaan tersebut proses kegiatan pembangunan dimulai. Yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri yang harus diperkuat dalam artian memberdayakannya.

Untuk menjaga proses penguatan lembaga kemasyarakatan, pemerintah telah menyediakan serangkaian regulasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Sesuai dengan bunyi Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Kemudian berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan

(LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, RT/RW, Karang Taruna; dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Penataan dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sangat penting, terutama untuk meningkatkan kedudukan dan peran lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di tengah-tengah kelompok masyarakat menjadi suatu media interaksi sosial kemasyarakatan serta dapat sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam intervensi terhadap kebijakan pemerintah. Disini terlampir data Tahun 2018 terdapat sekitar 7908 lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang tersebar di 12 Kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau. Rincian jumlah lembaga kemasyarakatan tersebut disajikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Data Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Riau pada Tahun 2018

	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH DESA / KELURAHAN			LPM D/K	LEMBAGA ADAT	PKK	RW	RT	KARANG TARUNA	LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA					
		DESA	KELURAHAN	TOTAL DESA/ KEL							POSYANDU	BUMDES	POSYANTEK	UED-SP	BPD	PASAR DESA
1	2				3	4	5	6	7	8						
1	PEKANBARU	0	58	58	58	1	59	807	2495	58	607	0	12	52	0	0
2	BENGKALIS	136	19	155	155	8	164	965	2879	136	486	136	8	155	136	71
3	KUANSING	218	11	229	229	60	230	1330	1830	229	313	3	12	129	218	218
4	SIAK	122	9	131	131	14	132	827	1852	131	219	63	14	117	122	46
5	PELALAWAN	104	14	118	118	13	119	691	1837	118	118	39	12	89	104	61
6	KEP.MERANTI	96	5	101	101	9	102	443	1837	101	210	25	7	53	96	12
7	ROKAN HULU	144	6	150	150	16	164	1005	2507	150	150	104	14	163	144	83
8	ROKAN HILIR	179	15	194	194	1	187	1030	2867	186	186	0	13	29	179	71
9	KAMPAR	242	9	251	251	62	251	1672	4190	251	613	208	21	-	242	90
10	INDRAGIRI HILIR	198	39	237	237	237	238	1492	4819	237	237	41	20	71	198	112
11	INDRAGIRI HULU	178	16	194	194	15	209	1000	2419	209	392	8	14	93	178	48
12	DUMAI	0	33	33	33	16	34	0	527	33	185	0	5	33	0	0
JUMLAH		1617	234	1851	1851	452	1889	11262	30059	1839	3716	627	152	984	1617	812

Sumber: Bidang Pemberdayaan Dinas PMD Tahun 2019

Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan merupakan langkah yang baik dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya pada pemerintah desa. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi salah satunya dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas serta bimbingan teknis pada pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau.

Salah satu kegiatan fasilitasi dan penataan lembaga kemasyarakatan di Provinsi Riau pada tahun 2018 telah dilaksanakan Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM se-Provinsi Riau. Kegiatan peningkatan kapasitas pengurus LPM se-Provinsi Riau ini diikuti 150 orang. Sasaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lpm ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pengurus LPM terampil menjadi inisiator dalam pengembangan konsep dan program pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan demikian *outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini pada akhirnya dalam rangka penyamaan persepsi antara pemerintah dengan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta mewujudkan sasaran prioritas SKPD dalam meningkatkan peran dan fungsi LPM menuju pembangunan masyarakat desa yang mandiri.

Lembaga Adat

Lembaga Adat menurut Pasal 95 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa. Sepanjang keputusan itu-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidaknya ditoleransikan. Lembaga hukum adat menjadi suatu perkumpulan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sosial ekonomi, keagamaan dan berbagai hal sebagai bentuk keterwakilan suatu komunitas dalam pembangunan.

Tugas – tugas yang dilakukan oleh Lembaga Adat adalah tugas dan fungsinya yang terkait dengan upacara adat, penyelesaian konflik, belum menyentuh tugas-tugas dan fungsi yang secara praktis dapat mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adat. Belum ada mekanisme yang transparan dalam penentuan lembaga adat. Sehingga tidak jelas apa syarat-syaratnya, siapa yang memilihnya, bagaimana penetapannya dan berapa lama masa baktinya, belum adanya penghargaan yang wajar terhadap kerja kerasnya melalui honorarium bulanan sebagaimana umumnya sebuah lembaga. Sehingga dapat diuraikan tugas-tugas lembaga adat itu antara lain:

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan.
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safe Guarding Of The Intangible Culture Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan budaya Tak Benda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan nilai sosial Budaya Masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penekanan terhadap kebijakan tersebut, didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*indigenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, dan kelembagaan masyarakat lokal. Orientasi ini mengarahkan masyarakat adat kepada pengambilan inisiatif, prakarsa, dan kreativitas yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi masyarakat dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainability*) serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

Pada tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus kerapatan adat dengan output meningkatnya pengetahuan pengurus kerapatan adat dalam rangka pelestarian adat melayu dan kearifan lokal. Kegiatan ini diikuti oleh 118 orang pengurus kerapatan adat se-Provinsi Riau. Selain itu juga dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat di Provinsi Riau dalam rangka penyusunan database adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang terdapat di Provinsi Riau. Rincian jumlah lembaga Adat tersebut disajikan pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4. Data Lembaga Adat di Provinsi Riau pada Tahun 2018

Jumlah Lembaga Adat Menurut Kab/Kota di Provinsi Riau						
No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANSING	60	60	60	60	0%
2	INDRAGIRI HULU	15	15	15	15	0%
3	INDRAGIRI HILIR	237	237	237	237	0%
4	PELALAWAN	13	13	13	13	0%
5	SIAK	14	14	14	14	0%
6	KAMPAR	62	62	62	62	0%
7	ROKAN HULU	16	16	16	16	0%
8	BENGKALIS	8	8	8	8	0%
9	ROKAN HILIR	1	1	1	1	0%
10	KEP.MERANTI	9	9	9	9	0%
11	PEKANBARU	1	1	1	1	0%
12	DUMAI	16	16	16	16	0%
JUMLAH		452	452	452	452	0%

Sumber: Bidang Pemberdayaan Dinas PMD Tahun 2019

2. Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik maka pembinaan dan pengawasan yang harus dilaksanakan pada lembaga di Desa yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa;

Sasaran ini menginginkan bahwa Pemerintah Desa bisa berperan dalam proses pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan publik di perdesaan. Pada tahun 2018 Beberapa upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran ini, diantaranya meningkatkan kompetensi aparatur desa dengan berbagai kegiatan, diataranya:

1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa sejumlah 891 orang kepala desa
2. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejumlah 144 orang anggota BPD
3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK) sejumlah 789 orang anggota PKK

Dengan meningkatnya kompetensi aparatur desa, diharapkan proses penyelenggaraan pemerintah desa dapat terlaksana secara akuntabel. Sehingga peran yang diharapkan dapat tercapai. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau antara lain:

a. Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah Desa memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan di bidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah Desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan Desa). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

c. Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator;

Peran pemerintah Desa sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan Desa). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Fasilitasi dalam UKM misalnya, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM.

Tabel 2.5. Rincian Data Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	DATA PERMENDAGRI 137 TH 2017			
		KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	TOTAL
1	KAMPAR	21	8	242	250
2	INDRAGIRI HULU	14	16	178	194
3	BENGKALIS	11	19	136	155
4	INDRAGIRI HILIR	20	39	197	236
5	PELALAWAN	12	14	104	118
6	ROKAN HULU	16	6	139	145
7	ROKAN HILIR	15	25	159	184
8	SIAK	14	9	122	131
9	KUANTAN SINGINGI	15	11	218	229
10	KEPEPULAUAN MERANTI	9	5	96	101
11	PEKANBARU	12	83	0	83
12	DUMAI	7	33	0	33
TOTAL		166	268	1591	1859

Sumber: Bidang Pemdeskel Dinas PMD Tahun 2019

Tabel 2.6. Rekapitulasi Data Klasifikasi Desa Dan Kelurahan Se Provinsi Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL	JUMLAH DESA/ KELURAHAN		KLASIFIKASI			KLASIFIKASI		
			DESA	KELURAHAN	2016			2017		
					SWADAYA	SWAKARYA	SWASEMBADA	SWADAYA	SWAKARYA	SWASEMBADA
1	KAMPAR	250	242	8	45	11	0	47	1	1
2	INDRAGIRI HULU	194	178	16	135	56	23	48	107	39
3	BENGKALIS	155	136	19	99	5	2	35	100	20
4	INDRAGIRI HILIR	236	197	39	183	66	3	190	1	0
5	PELALAWAN	118	104	14	97	57	12	73	36	7
6	ROKAN HULU	145	139	6	97	25	6	24	91	26
7	ROKAN HILIR	184	159	25	63	5	1	64	10	3
8	SIAK	131	122	9	74	6	0	50	63	4
9	KUANTAN SINGINGI	229	218	11	133	2	0	134	1	0
10	KEPULAUAN MERANTI	101	96	5	16	9	1	20	5	1
11	PEKANBARU	83	0	83	32	11	0	29	3	0
12	DUMAI	33	0	33	16	3	1	17	2	0
TOTAL		1859	1591	268	990	256	49	731	420	101

Sumber: Bidang Pemdeskel Dinas PMD Tahun 2019

Sedangkan menurut menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi desa dibagi menjadi beberapa kategori yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

Tabel 2.7. Tabel Indeks Desa Membangun

KABUPATEN	STATUS PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2016						STATUS PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2017						STATUS PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2018					
	ST	T	B	MJ	MN	JUMLAH	ST	T	B	MJ	MN	JUMLAH	ST	T	B	MJ	MN	JUMLAH
KUANTAN SINGINGI	75	117	26	0	0	218	34	134	47	3	0	218	4	97	107	10	0	218
INDRAGIRI HULU	53	98	27	0	0	178	15	73	80	10	0	178	2	54	101	21	0	178
INDRAGIRI HILIR	62	111	25	0	0	198	17	129	49	2	0	197	11	116	59	11	0	197
PELALAWAN	27	65	12	0	0	104	4	44	52	4	0	104	1	21	67	11	4	104
SIAK	25	59	35	3	0	122	0	1	107	12	2	122	0	4	94	21	3	122
KAMPAR	52	140	48	2	0	242	30	73	118	20	1	242	18	53	144	26	1	242
ROKAN HULU	12	82	43	2	0	139	7	30	94	8	0	139	2	17	102	17	1	139
BENGKALIS	33	84	19	0	0	136	0	47	81	7	1	136	0	10	100	25	1	136
ROKAN HILIR	32	92	34	1	0	159	8	78	70	3	0	159	1	31	113	14	0	159
KEPULAUAN MERANTI	52	38	6	0	0	96	6	52	38	0	0	96	6	36	49	5	0	96
JUMLAH	423	886	275	8	0	1592	121	661	736	69	4	1591	45	439	936	161	10	1591

Sumber: Data IDM Tahun 2019

Pada tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 desa sangat tertinggal mengalami penurunan karena statusnya naik menjadi desa tertinggal sedangkan desa tertinggal mengalami kenaikan disebabkan oleh bertambahnya jumlah desa yang sangat tertinggal naik statusnya menjadi desa tertinggal dan desa berkembang mengalami penurunan status menjadi desa tertinggal, Pada desa berkembang jumlahnya mengalami penurunan karena statusnya

turun menjadi desa tertinggal dan ada beberapa desa maju turun status menjadi desa berkembang sedangkan desa mandiri mengalami kenaikan yang cukup membanggakan yaitu yang semula Cuma 4 desa skrg sudah menjadi 10 desa mandiri.

3. Meningkatnya efektifitas pelayanan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan publik;

Kinerja sasaran ini mempunyai target untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pada desa-desa agar pengelolaan keuangan dan aset pada desa bisa terlihat lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Mendorong meningkatnya kapasitas pengelola keuangan desa.

Untuk mewujudkan hal ini perlu dilakukan arah kebijakan supaya bisa membenahi pengelolaan keuangan desa-desa yang dirasa belum sesuai ketentuan dan keinginan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Ketersediaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

2. Mendorong meningkatnya kapasitas pengelola aset desa.

Untuk mewujudkan hal ini perlu dilakukan arah kebijakan supaya bisa membenahi pengelolaan aset desa-desa yang dirasa belum sesuai ketentuan dan keinginan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas Tim Pelaksana Pengelolaan Aset Desa
- b. Ketersediaan fasilitasi pengelolaan aset desa

3. Mendorong meningkatnya Kapasitas pendamping desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Untuk mewujudkan hal ini perlu dilakukan arah kebijakan supaya bisa membenahi Kapasitas pendamping desa yang dirasa belum sesuai ketentuan dan keinginan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan Administrasi Program (PAP).
- b. Ketersediaan Pelayanan UPM.
- c. Meningkatnya kapasitas pendamping desa.

d. Ketersediaan fasilitas pengendalian pendapatan desa.

4. Peningkatan Kemandirian Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa melalui pemanfaatan Potensi Masyarakat, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

Kinerja sasaran ini mempunyai target memandirikan lembaga ekonomi desa sehingga bisa berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan pembangunan di perdesaan. Lembaga Ekonomi desa yang menjadi sasaran pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau adalah:

- a) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b) Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);
- c) Pasar Desa.

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Desa di Provinsi Riau menurut PERMENDAGRI NO.56/2015 sebanyak 1.592 desa, dari 1.592 desa di Provinsi Riau telah terbentuk BUMDesa sebanyak 708

desa dan yang belum terbentuk BUM Desa sebanyak 884 desa, dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.8. Data Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2018 di Provinsi Riau

Kabupaten	Jumlah Desa (PERMENDAGRI NO.56/2015)	Jumlah BUM Desa yang Terbentuk	Belum Terbentuk
Kampar	242	201	41
Indragiri Hulu	178	29	149
Bengkalis	136	108	28
Indragiri Hilir	197	58	140
Pelalawan	104	55	49
Rokan Hulu	139	139	0
Rokan Hilir	159	23	136
Siak	122	117	5
Kuantan Singingi	218	18	200
Kepulauan Meranti	96	67	29
TOTAL RIAU	1.591	815	777

Sumber: Bidang TTG Dinas PMD Tahun 2019

Sedangkan untuk data Perkembangan BUMDES dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Data Perkembangan BUMDes Provinsi Riau

DATA PERKEMBANGAN BUM DESA PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2018

NO	KABUPATEN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	KAMPAR	41	51	181	201
2	ROKAN HILIR	-	-	23	135
3	ROKAN HULU	104	136	136	140
4	PELALAWAN	39	53	53	104
5	SIAK	63	117	117	122
6	INDRAGIRI HILIR	41	36	57	58
7	INDRAGIRI HULU	10	14	20	29
8	KUANTAN SINGINGI	3	15	15	43
9	KEPULAUAN MERANTI	25	20	67	68
10	BENGKALIS	7	136	136	136
		333	578	805	1036

Sumber: Bidang TTG Dinas PMD Tahun 2019

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah BUMDES meningkat pada tahun 2018. Peningkatan tersebut terdapat di seluruh Kabupaten Kecuali Kabupaten Siak yang tidak meningkat jumlah BUMDESnya.

b. Pasar Desa

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Bidang Pembangunan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau tahun 2018 terdapat 812 Pasar Desa se Provinsi Riau. Dari sekian banyak yang telah diberikan bimbingan teknis pengelolaan pasar desa baru sebanyak 175 desa. Sedangkan desa yang belum pasar desa berjumlah 637 desa. Kondisi ini memerlukan kebijakan pemerintah guna menstimulus pertumbuhan pasar desa yang ada diprovinsi riau.

Tabel 2.10. Data Perkembangan Pasar Desa di Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0%
2	INDRAGIRI HULU	71	71	71	71	0%
3	INDRAGIRI HILIR	218	218	218	218	0%
4	PELALAWAN	46	46	46	46	0%
5	SIAK	61	61	61	61	0%
6	KAMPAR	12	12	12	12	0%
7	ROKAN HULU	83	83	83	83	0%
8	BENGKALIS	71	71	71	71	0%
9	ROKAN HILIR	90	90	90	90	0%
10	KEP.MERANTI	112	112	112	112	0%
11	PEKANBARU	48	48	48	48	0%
12	DUMAI	0	0	0	0	0%
JUMLAH		812	812	812	812	0%

Sumber: Bidang TTG Dinas PMD Tahun 2019

2.3. Isu– isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah/ kewenangan Provinsi dibidang Kesekretariatan, Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan pemerintahan dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari analisa faktor Internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

- 1) Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan professional dalam berbagai pelaksanaan tupoksi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/ kegiatan.
- 2) Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka strategis pelaksanaan program/ kegiatan.
- 3) Kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap capaian kinerja program/ kegiatan.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas.

- 5) Minimnya kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 6) Minimnya kapasitas pembina penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 7) Regulasi pengaturan tentang desa yang sangat dinamis;
- 8) Kurang harmonisnya lembaga penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 9) Lemahnya integritas aparatur Pemerintah Desa;
- 10) Sistem pengelolaan keuangan desa yang belum memadai;
- 11) Pembinaan dan pengawasan melekat yang belum optimal;
- 12) Pemberdayaan ekonomi Desa yang belum berjalan;
- 13) Pembinaan lembaga ekonomi desa yang belum optimal seperti bantuan permodalan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pengurus lembaga ekonomi desa;
- 14) Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui lembaga ekonomi desa;

Dari permasalahan di atas dapat diangkat beberapa isu yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau antara lain:

- a. Tata kelola Pemerintahan Desa
- b. Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel
- c. Kemandirian Lembaga Ekonomi Desa

Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian program prioritas, antara lain:

- 1) Dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan desa/kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat relatif terbatasnya.

- 2) Kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di pedesaan, seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader PKK dan Kader Posyandu.
- 3) Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan ada istiadat setempat seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
- 4) Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penggunaan obat-obatan terlarang, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Untuk itu, perlu diupayakan pemenuhan hak-hak dasar penduduk, seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatankeluarga dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 5) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Riau dalam Penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, selengkapnya sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 2.11. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Riau

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan
										10.058.316.244
						PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDKAN		Persentase Tertib Administrasi Kependudukan	45 Persentase	763.549.764
						Pengembangan database Kependudukan	Dinas PMD	Jumlah OPD yang memanfaatkan database kependudukan	5 OPD	238.100.000
						Peningkatan Kebijakan Kependudukan	Dinas PMD	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan kebijakan	12 Kab/Kota	179.600.000
						Pengembangan SIAK Provinsi	Dinas PMD	Jumlah Kab/kota yang terkoneksi SIAK terpadu dengan Provinsi	2 Kab/Kota	165.849.764
						Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas PMD	Persentase data kependudukan yang akurat,valid dan akuntabel	91 Persen	180.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.314.570.880	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.469.866.880
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Dinas PMD	Jumlah surat yang dikirim	37 Surat	11.000.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Dinas PMD	Jumlah surat yang dikirim	37 Surat	11.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMD	Jumlah rekening yang dibayar	36 Rekening	402.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMD	Jumlah rekening yang dibayar	24 Rekening	342.600.000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas PMD	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	305.474.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas PMD	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	276.000.000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas PMD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 Unit	211.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas PMD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 Unit	211.200.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas PMD	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	60 Jenis	185.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas PMD	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	60 Jenis	85.000.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMD	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	20 Jenis	130.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMD	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	20 Jenis	69.050.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	44.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	20 Jenis	30.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Penyediaan Makan dan Minuman	Dinas PMD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	6,500 Porsi	200.000.000	Penyediaan Makan dan Minuman	Dinas PMD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	11273 Porsi	200.000.000
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	dalam dan luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	130 Kali	700.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	dalam dan luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	130 Kali	500.000.000
10	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Dinas PMD	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	32 Orang	720.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Dinas PMD	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	384 OB	720.000.000
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas PMD	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	6 Orang	175.000.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas PMD	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	72 OB	174.720.000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	1.353.896.880	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	1.038.896.880
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	30 Unit	290.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 Unit	165.000.000
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	60 Unit	350.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	18 Unit	160.000.000
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	17 Ruang	673.896.880	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	17 Ruang	673.896.880
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	85 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	85 Unit	40.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100%	138.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100%	138.000.000
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas PMD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	115 Stel	69.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas PMD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	115 Stel	69.000.000
17	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas PMD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	115 Stel	69.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas PMD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	115 Stel	69.000.000
IV	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan BUMDes Yang Aktif	6%	3.268.000.000	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan	11%	2.720.617.000
18	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pendamping profesional desa se-Provinsi Riau	150 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pendamping profesional desa se-Provinsi Riau	150 Orang	244.418.000
19	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa	250 Orang	500.000.000	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa	250 Orang	489.620.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Provinsi Riau	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa	1 Dokumen	200.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Provinsi Riau	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa	1 Dokumen	114.239.000
21	Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan dibina	12 Kab/kota	398.000.000	Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan dibina	12 Kab/kota	342.608.000
22	Pembinaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Kepada Desa	Provinsi Riau	Jumlah kab yang dibina dan dievaluasi	10 Kabupaten	350.000.000	Pembinaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Kepada Desa	Provinsi Riau	Jumlah kab yang dibina dan dievaluasi	10 Kabupaten	322.418.000
23	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa	Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas	80 Orang	350.000.000	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa	Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas	90 Orang	297.500.000
24	Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa	Provinsi Riau	Jumlah peserta rapat kerja urusan Pemerintahan Desa	470 Orang	800.000.000	Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa	Provinsi Riau	Jumlah peserta rapat kerja urusan Pemerintahan Desa	470 Orang	739.292.500
25	Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota dalam Rangka Penataan Desa	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	12 Kab/Kota	250.000.000	Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota dalam Rangka Penataan Desa	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	12 Kab/Kota	76.112.000
26	Pembinaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Provinsi Riau	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki data profil aktif berbasis sistem informasi partisipatif	32 Desa/Kelurahan	170.000.000	Pembinaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Provinsi Riau	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki data profil aktif berbasis sistem informasi partisipatif	36 Desa/Kelurahan	94.409.500

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DI DESA		persentase desa dan kelurahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik	30%	3.700.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DI DESA		persentase desa dan kelurahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik	35%	2.777.682.600
27	Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Riau	Jumlah Peserta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Orang	600.000.000	Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Riau	Jumlah Peserta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan	250 Orang	600.000.000
28	Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	provinsi Riau	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	150 Orang	450.000.000	Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	provinsi Riau	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	120 Orang	234.752.800
29	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang berpartisipasi pada kegiatan BBGRM	12 Kab/Kota	300.000.000	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang berpartisipasi pada kegiatan BBGRM	12 Kab/Kota	254.785.000
30	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Provinsi Riau	Jumlah kader pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Orang	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Provinsi Riau	Jumlah kader pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	174.238.800
31	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang Memiliki dan Melaksanakan Unit Pengaduan Masyarakat	12 Kab/Kota	200.000.000	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang Memiliki dan Melaksanakan Unit Pengaduan Masyarakat	12 Kab/Kota	0

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan
										10.058.316.244
32	Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah BUMDes yang memperoleh pembinaan, pengembangan dan pengawasan	240 BUMDes	750.000.000	Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah BUMDes yang memperoleh pembinaan, pengembangan dan pengawasan	300 BUMDes	736.805.400
33	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan Pedesaan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah lembaga ekonomi kawasan pedesaan yang dikembangkan	10 Lembaga Ekonomi	250.000.000	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan Pedesaan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah lembaga ekonomi kawasan pedesaan yang dikembangkan	10 Lembaga Ekonomi	174.220.000
34	Pembinaan dan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Gelar TTG Nasional	12 Kab/Kota	450.000.000	Pembinaan dan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Gelar TTG Nasional	12 Kab/Kota	313.704.600
35	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Provinsi Riau	Jumlah pengurus KP-SPAMS yang mengikuti peningkatan kapasitas	70 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Provinsi Riau	Jumlah pengurus KP-SPAMS yang mengikuti peningkatan kapasitas	100 Orang	144.588.000
36	Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Provinsi Riau	Jumlah kabupaten yang dibina	10 Kabupaten	250.000.000	Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Provinsi Riau	Jumlah kabupaten yang dibina	10 Kabupaten	144.588.000
					11.544.170.880					10.058.316.244

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Berikut ini adalah beberapa program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari Pemerintahan Desa, Kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi Lembaga, yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, pada beberapa kali kesempatan Rapat Koordinasi maupun lanjutan hasil Musrenbang. Usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam merumuskan Program dan Kegiatan untuk tahun rencana berjalan dengan mempertimbangkan prioritas Program dan Kegiatan guna pencapaian Visi dan Misi Provinsi Riau.

Adapun beberapa usulan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bagian Sekretariat

Pada bagian sekretariat usulan program dan kegiatan hanya mengusulkan kegiatan rutin dan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes bagi Aparatur Desa Se Provinsi Riau

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengusulkan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (PKK), Kegiatan Bulan bakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) tingkat Provinsi, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se Provinsi Riau

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dan Kelurahan mengusulkan Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan, Kegiatan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan Kelurahan, Kegiatan Pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka Penataan Wilayah Desa, Kegiatan Penyusunan data Profil Desa/Kelurahan dan Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa,

4. Bidang Fasilitas Keuangan Aset dan Pendamping Desa

Pada Bidang Fasilitas Keuangan Aset dan Pendamping Desa mengusulkan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Se Provinsi Riau, Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa dan kegiatan Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se Provinsi Riau/Pendamping Desa, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se Provinsi Riau

5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

Pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mengusulkan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa Se Provinsi Riau, Kegiatan Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS, Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional (TTG) dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Bumdes Se Provinsi Riau, Kegiatan Pemetaan Kawasan Pedesaan.

Program dan Kegiatan diatas diusulkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa yang bertujuan untuk pembangunan dan perkembangan desa untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Riau dan NAWACITA Presiden Republik Indonesia.

Tabel 2.12. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	BESARAN/VOLUME	CATATAN
01.15	Program Pembinaan keberdayaan masyarakat dan Lembaga di desa		persentase Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan BUMDes yang aktif	-	
01.15.007	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)	Provinsi Riau	Jumlah Partisipasi Desa/Kelurahan yang membangun dengan gotong royong	12 Kab/ Kota	
01.15.xxx	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Provinsi Riau	Jumlah kader pemberdayaan Masyarakat (KPM)	100 Orang	
01.15.014	Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)	Provinsi Riau	Jumlah Peserta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 Orang	
01.15.031	Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Provinsi Riau	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	120 Orang	
01.16.020	Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah BUMDes yang memperoleh pembinaan, pengembangan dan pengawasan	300 BUMDes	
				-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden RI terpilih Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat arah kebijakan. Di dalam dokumen rencana tersebut juga memuat indikator-indikator pembangunan beserta sasarnya berdasarkan *exercise* pagu indikator jangka menengah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Visi dan Misi Pembangunan Nasional

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan visi pembangunan Indonesia adalah **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini terbentuk lah beberapa Fokus yaitu:

1. FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA
 - a. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
 - b. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
 - c. Pembangunan Karakter Bangsa
2. FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI
 - a. Pangan

- b. Energi
 - c. Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital
 - d. Industri Manufaktur
 - e. Kelautan dan Kemaritiman
3. FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
- a. Sentra-Sentra Pertumbuhan
 - b. Komoditas Unggulan Daerah
 - c. Pertumbuhan Perkotaan
4. FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
- a. Transportasi
 - b. Telekomunikasi
 - c. Sumber Daya Air
 - d. Perumahan dan Pemukiman
5. FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
- a. Hukum dan Regulasi
 - b. Pertahanan dan Keamanan
 - c. Politik

Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Kebangkitan Indonesia (TRISAKTI)

“Trisakti” adalah konsep paradigma yang dikemukakan oleh Bung Karno dalam rangka membangkitkan kembali Indonesia menjadi bangsa yang besar secara politik maupun ekonomi. Menurutnya tiga paradigma yang akan mampu membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar, baik secara politik maupun ekonomi. Konsep tiga paradigma tersebut dinamakan dengan “Trisakti” atau tiga kekuatan yang berfungsi sebagai kesaktian bangsa.

Trisakti yang dimaksudkan Bung Karno adalah, pertama, **“Berdaulat dalam Politik”**. Sehingga Bung Karno menegaskan bahwa kedaulatan politik bangsa Indonesia sudah mutlak untuk diwujudkan dengan menolak segala bentuk intervensi bangsa lain. Bung Karno menyatakan, *“nation building”* dan *“character building”* harus diteruskan sehebat-hebatnya demi menunjang kedaulatan politik kita.

Kedua, **“Berdikari dalam Ekonomi”**. Bung Karno mengingatkan kita betapa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) baik di daratan maupun di laut. Akan tetapi kekayaan SDA ini belum mampu membangkitkan ekonomi nasional dikarenakan tingkat ketergantungan terhadap pranata ekonomi asing masih sangat tinggi. Dengan melihat fakta ini maka Bung Karno mengemukakan bahwa penting sekali bangsa Indonesia untuk “berdiri di atas kaki sendiri” (berdikari) dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat. Ketergantungan yang tinggi terhadap ekonomi bangsa lain menurut Bung Karno tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat, bahkan justru sebaliknya berpotensi menimbulkan resesi ekonomi nasional yang berkepanjangan. Apa yang menjadi kekhawatiran Bung Karno ini ternyata terbukti, terutama ketika bangsa Indonesia pada era Orde Baru mulai berafiliasi dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan lain-lainnya, sehingga bangsa Indonesia tidak bisa menghindarkan diri dari krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga hari ini.

Ketiga, “**Berkepribadian dalam Kebudayaan**”. Aspek budaya bagi Bung Karno sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bangsa Indonesia harus menghormati budaya warisan nenek moyang dan menghargai nilai-nilai luhur kebudayaan di masyarakat. Karakter dan kepribadian budaya positif Nusantara haruslah dijaga dan dilestarikan. Misalnya budaya gotong-royong yang melambangkan kolektifitas sebuah komunitas yang guyub, maupun berbagai karya budaya adiluhung yang mewarnai dunia seni Indonesia.

Konsep tersebut dijabarkan ke dalam batang tubuh RPJMN 2015-2019 dalam bentuk 3 agenda perubahan Indonesai berupa:

- 1) Berdaulat dalam Politik (dijabarkan dalam 12 Program Aksi dan Prioritas Utama) dengan sasaran utama:
 - Pembangunan demokrasi politik
 - Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong
- 2) Berdikari dalam Ekonomi (dijabarkan dalam 16 Program Aksi) dengan sasaran utama:
 - Rakyat sebagai pemegang kedaulatan keuangan negara dan pelaku utama pembentukan produksi dan distribusi nasional
 - Pemenuhan hak dasar rakyat
- 3) Kepribadian dalam kebudayaan (dijabarkan berupa 3 Program Aksi) dengan sasaran utama:
 - Pembangunan karakter dan kegotongroyongan
 - Kebhinekaan dan kemaritiman sebagai potensi bangsa untuk demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Sebagai perwujudan nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan adalah memperkuat implementasi UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu dengan menganggarkan Dana Desa melalui APBN, dengan didampingi oleh tenaga Pendamping Desa yang telah dimulai sejak tahun 2014 yang lalu. Berikut Tabel Roadmap Dana Desa;

Tabel 3.1. Roadmaap Dana Desa

No	Tahun	Total
1	2015	Dana Desa(DD): Rp20.766,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 280,3 juta ADD: Rp32.666,4M BagiHasilPDRD: Rp2.091,0 M TOTAL= Rp55.523,6M Rata2 perdesa: Rp749,4juta
2	2016	Dana Desa(DD): Rp46.982,1M Rata-rata DD per Desa: Rp 628,5 juta ADD: Rp36.723,9M BagiHasilPDRD: Rp2.650,4M TOTAL= Rp86.356,4M Rata2 perdesa: Rp1.115,2juta
3	2017	Dana Desa(DD): Rp89.000 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.080,7 juta ADD: Rp42.285,9M BagiHasilPDRD: Rp2.733,8M TOTAL= Rp134.019,7 M Rata2 perdesa: Rp1.792,8 juta
4	2018	Dana Desa(DD): Rp103.791,1M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.400,8 juta ADD: Rp55.939,8M BagiHasilPDRD: Rp3.055,3M TOTAL= Rp162.786,3M Rata2 perdesa: Rp2.197,1 juta
5	2019	Dana Desa(DD): Rp111.840,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.509,5 juta ADD: Rp60.278,0M BagiHasilPDRD: Rp3.376,7M TOTAL= Rp175.494,9 M Rata2 perdesa: Rp2.368,6juta

Sumber:Kementerian Keuangan, 2017

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 2020

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2019-2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau sebagai berikut

Tujuan : “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Perkembangan Desa/Kelurahan di Provinsi Riau”

Sasaran :

1. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan;
2. Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa dan Kelurahan di Provinsi Riau
3. Meningkatnya lembaga ekonomi desa aktif di Provinsi Riau
4. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel di Provinsi Riau;

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2024, dilaksanakan melalui kebijakan strategi yang merupakan kebijakan prioritas dan diturunkan kedalam program-program strategi. Kebijakan strategi yang dirumuskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mendorong meningkatnya Peran Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan yang berkelanjutan
2. Mendorong meningkatnya Peran Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan yang berkelanjutan
3. Mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan yang berkelanjutan

4. Mendorong meningkatnya kapasitas aparat desa dan BPD
5. Mendorong meningkatnya ketersediaan data klasifikasi perkembangan desa dan kelurahan
6. Mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
7. Mendorong meningkatnya kapasitas pengurus lembaga ekonomi desa
8. Mendorong meningkatnya dayaguna potensi produk unggulan desa
9. Mendorong meningkatnya Peran Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
10. Mendorong meningkatnya kapasitas pengelola keuangan desa
11. Mendorong meningkatnya kapasitas pengelola aset desa
12. Mendorong meningkatnya Kapasitas pendamping desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa

Perumusan kebijakan strategi pada organisasi menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang selanjutnya memunculkan arah kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan input, output, outcome serta impact dari perencanaan yang dilakukan.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Bappeda Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Bappeda Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu

tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 2019-2024, yang terdiri dari;

1. Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan ,partisipasi masyarakat dan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal yang maju dan dinamis dalam pembangunan desa/kelurahan;
2. Meningkatnya efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik;
3. Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Usaha Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG);
5. Meningkatnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan serta Kepegawaian dan Umum;

Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 8 program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2020 yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
5. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
6. Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Lembaga Di Desa

Adapun rincian rencana kegiatan per program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1.2.07.01.1.2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.2.07.01.1.2.06.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan
1.2.07.01.1.2.06.15.001	Pengembangan Database Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan database kependudukan
1.2.07.01.1.2.06.15.002	Peningkatan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan kebijakan kependudukan
1.2.07.01.1.2.06.15.003	Pengembangan SIAK Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terkoneksi SIAK terpadu dengan Provinsi
1.2.07.01.1.2.06.15.004	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat, valid dan akuntabel
1.2.07.01.1.2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1.2.07.01.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2.07.01.0.0.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim
1.2.07.01.0.0.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar
1.2.07.01.0.0.00.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
1.2.07.01.0.0.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

1.2.07.01.0.0.00.01.007 .	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
1.2.07.01.0.0.00.01.008 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan
1.2.07.01.0.0.00.01.009 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
1.2.07.01.0.0.00.01.010 .	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
1.2.07.01.0.0.00.01.011 .	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.2.07.01.0.0.00.01.012 .	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan
1.2.07.01.0.0.00.01.013 .	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan
1.2.07.01.0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1.2.07.01.0.0.00.02.007 .	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1.2.07.01.0.0.00.02.009 .	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
1.2.07.01.0.0.00.02.012 .	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara
1.2.07.01.0.0.00.02.016 .	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
1.2.07.01.0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN
1.2.07.01.0.0.00.03.001 .	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
1.2.07.01.0.0.00.03.003 .	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
1.2.07.01.1.2.07.15.	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dan Kelurahan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1.2.07.01.1.2.07.15.001 .	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se-Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pendamping profesional desa se- Provinsi Riau
1.2.07.01.1.2.07.15.002 .	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa
1.2.07.01.1.2.07.15.003 .	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa
1.2.07.01.1.2.07.15.004 .	Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan dibina
1.2.07.01.1.2.07.15.005 .	Pembinaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Kepada Desa	Jumlah kab yang dibina dan dievaluasi

1.2.07.01.1.2.07.15.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas
1.2.07.01.1.2.07.15.007	Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa	Jumlah peserta rapat kerja urusan Pemerintahan Desa
1.2.07.01.1.2.07.15.008	Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan
1.2.07.01.1.2.07.15.009	Pembinaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki data profil aktif berbasis sistem informasi partisipatif
1.2.07.01.1.2.07.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DI DESA	Persentase Lembaga Desa Aktif
1.2.07.01.1.2.07.16.001	Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1.2.07.01.1.2.07.16.002	Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas
1.2.07.01.1.2.07.16.003	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)	Jumlah Kab/Kota yang berpartisipasi pada kegiatan BBGRM
1.2.07.01.1.2.07.16.004	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah kader pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1.2.07.01.1.2.07.16.006	Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau	Jumlah BUMDes yang memperoleh pembinaan, pengembangan dan pengawasan
1.2.07.01.1.2.07.16.007	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan Pedesaan Provinsi Riau	Jumlah lembaga ekonomi kawasan pedesaan yang dikembangkan
1.2.07.01.1.2.07.16.008	Pembinaan dan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Gelar TTG Nasional
1.2.07.01.1.2.07.16.009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah pengurus KP-SPAMS yang mengikuti peningkatan kapasitas
1.2.07.01.1.2.07.16.010	Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah kabupaten yang dibina

Rencana Pendanaan Program/Kegiatan

Sedangkan pendanaan Program kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2020, dengan rincian masing-masing indikasi kebutuhan dana masing-masing program sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				26.887.285.301			32.748.012.238
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				16.828.969.057			18.511.865.962
1.2.07.01.1.2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				763.549.764			835.849.764
1.2.07.01.1.2.06.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan		45 Persentase	763.549.764		60 Persentase	835.849.764
1.2.07.01.1.2.06.15.001	Pengembangan Database Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan database kependudukan	DKPSP2KB	5 OPD	238.100.000		8 OPD	250.000.000
1.2.07.01.1.2.06.15.002	Peningkatan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan kebijakan	12 Kab/kota se- Provinsi	12 Kab/Kota	179.600.000		12 Kab/Kota	200.000.000
1.2.07.01.1.2.06.15.003	Pengembangan SIAK Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terkoneksi SIAK	Provinsi Riau	2 Kab/Kota	165.849.764		4 Kab/Kota	205.849.764
1.2.07.01.1.2.06.15.004	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat, valid dan akuntabel	Provinsi Riau	91 Persen	180.000.000		92 Persen	180.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.07.01.1.2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.294.766.480			13.400.296.512
1.2.07.01.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan		100 Persen	2.619.570.000		100 Persen	3.477.915.100
1.2.07.01.0.0.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Dinas Pemberdayaan	37 Surat	11.000.000		40 Surat	12.650.000
1.2.07.01.0.0.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Dinas Pemberdayaan	24 Rekening	342.600.000		24 Rekening	393.990.000
1.2.07.01.0.0.00.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pemberdayaan	12 Bulan	276.000.000		12 Bulan	351.295.100
1.2.07.01.0.0.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Dinas Pemberdayaan	11 Unit	211.200.000		11 Unit	242.880.000
1.2.07.01.0.0.00.01.007	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Dinas Pemberdayaan	60 Jenis	85.000.000		65 Jenis	212.750.000
1.2.07.01.0.0.00.01.008	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Dinas Pemberdayaan	20 Jenis	69.050.000		22 Jenis	149.500.000
1.2.07.01.0.0.00.01.009	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pemberdayaan	20 Jenis	30.000.000		20 Jenis	50.600.000
1.2.07.01.0.0.00.01.010	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Dinas Pemberdayaan	10353 Porsi	200.000.000		10500 Porsi	230.000.000
1.2.07.01.0.0.00.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dalam dan Luar Daerah	130 Kali	500.000.000		150 Kali	805.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.07.01.0.0.00.01.012	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang	Dinas Pemberdayaan	384 OB	720.000.000		384 OB	828.000.000
1.2.07.01.0.0.00.01.013	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Dinas Pemberdayaan	72 OB	174.720.000		72 OB	201.250.000
1.2.07.01.0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan		100 Persen	1.038.896.880		100 Persen	1.556.981.412
1.2.07.01.0.0.00.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Dinas Pemberdayaan	30 Unit	165.000.000		35 Unit	333.500.000
1.2.07.01.0.0.00.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Dinas Pemberdayaan	60 Unit	160.000.000		65 Unit	402.500.000
1.2.07.01.0.0.00.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pemberdayaan	17 Ruang	673.896.880		17 Ruang	774.981.412
1.2.07.01.0.0.00.02.016	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pemberdayaan	85 Unit	40.000.000		90 Unit	46.000.000
1.2.07.01.0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	138.000.000		100 Persen	158.700.000
1.2.07.01.0.0.00.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Dinas Pemberdayaan	115 Stel	69.000.000		120 Stel	79.350.000
1.2.07.01.0.0.00.03.003	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Dinas Pemberdayaan	115 Stel	69.000.000		120 Stel	79.350.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.07.01.1.2.07.15.	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN	Persentase Desa dan Kelurahan dengan		15 Persen	2.720.617.000		20 Persen	4.112.700.000
1.2.07.01.1.2.07.15.001	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se-Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pendamping profesional desa se- Provinsi Riau	Provinsi Riau	150 Orang	244.418.000		150 Orang	287.500.000
1.2.07.01.1.2.07.15.002	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa	Provinsi Riau	250 Orang	489.620.000		309 Orang	575.000.000
1.2.07.01.1.2.07.15.003	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa	Provinsi Riau (10 Kabupaten)	1 Dokumen	114.239.000		1 Dokumen	230.000.000
1.2.07.01.1.2.07.15.004	Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan dibina	Provinsi Riau	12 Kab/kota	342.608.000		12 Kab/kota	457.700.000
1.2.07.01.1.2.07.15.005	Pembinaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Kepada Desa	Jumlah kab yang dibina dan dievaluasi	Provinsi Riau	10 Kabupaten	322.418.000		10 Kabupaten	402.500.000
1.2.07.01.1.2.07.15.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Pembina Teknis	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas	Provinsi Riau	210 Orang	297.500.000		210 Orang	402.500.000
1.2.07.01.1.2.07.15.007	Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa	Jumlah peserta rapat kerja urusan Pemerintahan Desa	Provinsi Riau	470 Orang	739.292.500		470 Orang	920.000.000
1.2.07.01.1.2.07.15.008	Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	76.112.000		12 Kab/Kota	287.500.000
1.2.07.01.1.2.07.15.009	Pembinaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki data profil aktif berbasis sistem informasi partisipatif	Provinsi Riau	36 Desa/Kelurahan	94.409.500		700 Desa/Kelurahan	550.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.07.01.1.2.07.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DI	Persentase Lembaga Desa Aktif		35 Persen	2.777.682.600		40 Persen	4.094.000.000
1.2.07.01.1.2.07.16.001	Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan	Provinsi Riau	280 Orang	600.000.000		500 Orang	759.000.000
1.2.07.01.1.2.07.16.002	Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan	Provinsi Riau	350 Orang	234.752.800		350 Orang	517.500.000
1.2.07.01.1.2.07.16.003	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)	Jumlah Kab/Kota yang berpartisipasi pada kegiatan BBGRM	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	254.785.000		12 Kab/Kota	345.000.000
1.2.07.01.1.2.07.16.004	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan	Jumlah kader pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Riau	100 Orang	174.238.800		100 Orang	230.000.000
1.2.07.01.1.2.07.16.006	Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau	Jumlah BUMDes yang memperoleh pembinaan, pengembangan dan pengawasan	Provinsi Riau	300 BUMDes	736.805.400		300 BUMDes	862.500.000
1.2.07.01.1.2.07.16.007	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan Pedesaan Provinsi Riau	Jumlah lembaga ekonomi kawasan pedesaan yang dikembangkan	Provinsi Riau	10 Lembaga Ekonomi	174.220.000		10 Lembaga Ekonomi	287.500.000
1.2.07.01.1.2.07.16.008	Pembinaan dan Pelaksanaan Gelar Teknologi	Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Gelar TTG Nasional	Dalam Dan Luar Daerah	12 Kab/Kota	313.704.600		12 Kab/Kota	517.500.000
1.2.07.01.1.2.07.16.009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah pengurus KP-SPAMS yang mengikuti peningkatan kapasitas	Provinsi Riau	100 Orang	144.588.000		100 Orang	287.500.000
1.2.07.01.1.2.07.16.010	Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah kabupaten yang dibina	Provinsi Riau	10 Kabupaten	144.588.000		10 Kabupaten	287.500.000
J U M L A H					10.058.316.244			14.236.146.276

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10.058.316.244			14.236.146.276
1.2.07.01.1.2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				763.549.764			835.849.764
1.2.07.01.1.2.06.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan		45 Persentase	763.549.764		60 Persentase	835.849.764
1.2.07.01.1.2.06.15.001	Pengembangan Database Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan database kependudukan	DKPSP2KB	5 OPD	238.100.000		8 OPD	250.000.000
1.2.07.01.1.2.06.15.002	Peningkatan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan kebijakan	12 Kab/kota se-Provinsi	12 Kab/Kota	179.600.000		12 Kab/Kota	200.000.000
1.2.07.01.1.2.06.15.003	Pengembangan SIAK Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terkoneksi SIAK	Provinsi Riau	2 Kab/Kota	165.849.764		4 Kab/Kota	205.849.764
1.2.07.01.1.2.06.15.004	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat, valid dan akuntabel	Provinsi Riau	91 Persen	180.000.000		92 Persen	180.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.07.01.1.2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.294.766.480			13.400.296.512
1.2.07.01.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan		100 Persen	2.619.570.000		100 Persen	3.477.915.100
1.2.07.01.0.0.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Dinas Pemberdayaan	37 Surat	11.000.000		40 Surat	12.650.000
1.2.07.01.0.0.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Dinas Pemberdayaan	24 Rekening	342.600.000		24 Rekening	393.990.000
1.2.07.01.0.0.00.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pemberdayaan	12 Bulan	276.000.000		12 Bulan	351.295.100
1.2.07.01.0.0.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Dinas Pemberdayaan	11 Unit	211.200.000		11 Unit	242.880.000
1.2.07.01.0.0.00.01.007	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Dinas Pemberdayaan	60 Jenis	85.000.000		65 Jenis	212.750.000
1.2.07.01.0.0.00.01.008	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Dinas Pemberdayaan	20 Jenis	69.050.000		22 Jenis	149.500.000
1.2.07.01.0.0.00.01.009	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pemberdayaan	20 Jenis	30.000.000		20 Jenis	50.600.000
1.2.07.01.0.0.00.01.010	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Dinas Pemberdayaan	10353 Porsi	200.000.000		10500 Porsi	230.000.000
1.2.07.01.0.0.00.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dalam dan Luar Daerah	130 Kali	500.000.000		150 Kali	805.000.000
1.2.07.01.0.0.00.01.012	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang	Dinas Pemberdayaan	384 OB	720.000.000		384 OB	828.000.000
1.2.07.01.0.0.00.01.013	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Dinas Pemberdayaan	72 OB	174.720.000		72 OB	201.250.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.07.01.0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan		100 Persen	1.038.896.880		100 Persen	1.556.981.412
1.2.07.01.0.0.00.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Dinas Pemberdayaan	30 Unit	165.000.000		35 Unit	333.500.000
1.2.07.01.0.0.00.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Dinas Pemberdayaan	60 Unit	160.000.000		65 Unit	402.500.000
1.2.07.01.0.0.00.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pemberdayaan	17 Ruang	673.896.880		17 Ruang	774.981.412
1.2.07.01.0.0.00.02.016	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pemberdayaan	85 Unit	40.000.000		90 Unit	46.000.000
1.2.07.01.0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	138.000.000		100 Persen	158.700.000
1.2.07.01.0.0.00.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Dinas Pemberdayaan	115 Stel	69.000.000		120 Stel	79.350.000
1.2.07.01.0.0.00.03.003	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Dinas Pemberdayaan	115 Stel	69.000.000		120 Stel	79.350.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.07.01.1.2.07.15.	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN	Persentase Desa dan Kelurahan dengan		15 Persen	2.720.617.000		20 Persen	4.112.700.000
1.2.07.01.1.2.07.15.001	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se-Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pendamping profesional desa se- Provinsi Riau	Provinsi Riau	150 Orang	244.418.000		150 Orang	287.500.000
1.2.07.01.1.2.07.15.002	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa	Provinsi Riau	250 Orang	489.620.000		309 Orang	575.000.000
1.2.07.01.1.2.07.15.003	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa	Provinsi Riau (10 Kabupaten)	1 Dokumen	114.239.000		1 Dokumen	230.000.000
1.2.07.01.1.2.07.15.004	Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan dibina	Provinsi Riau	12 Kab/kota	342.608.000		12 Kab/kota	457.700.000
1.2.07.01.1.2.07.15.005	Pembinaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Kepada Desa	Jumlah kab yang dibina dan dievaluasi	Provinsi Riau	10 Kabupaten	322.418.000		10 Kabupaten	402.500.000
1.2.07.01.1.2.07.15.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Pembina Teknis	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas	Provinsi Riau	210 Orang	297.500.000		210 Orang	402.500.000
1.2.07.01.1.2.07.15.007	Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa	Jumlah peserta rapat kerja urusan Pemerintahan Desa	Provinsi Riau	470 Orang	739.292.500		470 Orang	920.000.000
1.2.07.01.1.2.07.15.008	Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	76.112.000		12 Kab/Kota	287.500.000
1.2.07.01.1.2.07.15.009	Pembinaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki data profil aktif berbasis sistem informasi partisipatif	Provinsi Riau	36 Desa/Kelurahan	94.409.500		700 Desa/Kelurahan	550.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.07.01.1.2.07.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DI	Persentase Lembaga Desa Aktif		35 Persen	2.777.682.600		40 Persen	4.094.000.000
1.2.07.01.1.2.07.16.001	Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan	Provinsi Riau	280 Orang	600.000.000		500 Orang	759.000.000
1.2.07.01.1.2.07.16.002	Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan	Provinsi Riau	350 Orang	234.752.800		350 Orang	517.500.000
1.2.07.01.1.2.07.16.003	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)	Jumlah Kab/Kota yang berpartisipasi pada kegiatan BBGRM	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	254.785.000		12 Kab/Kota	345.000.000
1.2.07.01.1.2.07.16.004	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan	Jumlah kader pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Riau	100 Orang	174.238.800		100 Orang	230.000.000
1.2.07.01.1.2.07.16.006	Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau	Jumlah BUMDes yang memperoleh pembinaan, pengembangan dan pengawasan	Provinsi Riau	300 BUMDes	736.805.400		300 BUMDes	862.500.000
1.2.07.01.1.2.07.16.007	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan Pedesaan Provinsi Riau	Jumlah lembaga ekonomi kawasan pedesaan yang dikembangkan	Provinsi Riau	10 Lembaga Ekonomi	174.220.000		10 Lembaga Ekonomi	287.500.000
1.2.07.01.1.2.07.16.008	Pembinaan dan Pelaksanaan Gelar Teknologi	Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Gelar TTG Nasional	Dalam Dan Luar Daerah	12 Kab/Kota	313.704.600		12 Kab/Kota	517.500.000
1.2.07.01.1.2.07.16.009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah pengurus KP-SPAMS yang mengikuti peningkatan kapasitas	Provinsi Riau	100 Orang	144.588.000		100 Orang	287.500.000
1.2.07.01.1.2.07.16.010	Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah kabupaten yang dibina	Provinsi Riau	10 Kabupaten	144.588.000		10 Kabupaten	287.500.000
J U M L A H					10.058.316.244			14.236.146.276

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Provinsi Riau Tahun 2020 merupakan agenda tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri No 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersumber dari APBD yang harus berpedoman pada (RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi, RENSTRA dll).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Agar menjadi pedoman bagi pengelola manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Renja ini Diharapkan menjadi acuan kepada Bagian dan Bidang dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.

- c. Dalam penyusunan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan, cepat, sesuai dengan waktu yang ditentukan agar penyusunan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pekanbaru, Agustus 2019

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. SYARIFUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19620504 198803 1 006